

## **ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk**

**Agung Prasetya**

**Suhendro**

**Riana R Dewi**

Universitas Islam Batik Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

**Email : [Agunkp30@gmail.com](mailto:Agunkp30@gmail.com)**

### ***Abstract***

*The purpose of this research is to find out and analyze the application of income tax at PT. Enseval Putera Megatrading Tbk. This study uses descriptive qualitative research. The object of this research is PT Enseval Putra Megatrading Tbk. The analysis technique of this research uses comparative descriptive analysis. Data collection techniques are observation and interview. The results showed that the analysis of calculation, deduction, payment and reporting of Article 21 PPh at PT Enseval Putera Megatrading Tbk was in accordance with the law and there was no difference in calculation between the company and the researcher. Analysis of calculation, deduction, payment and reporting of Article 22 PPh to PT Enseval Putra Megatrading Tbk is in accordance with the law. Although there is a very small difference between companies and researchers. This happened because of the basic calculation of Article 22 Income Tax. Analysis of calculation, deduction, payment and reporting of Article 23 PPh at PT Enseval Putra Megatrading Tbk was in accordance with the law and there was no difference in calculation between the company and the researcher.*

*Keywords: income tax, 21, 22, 23 article*

### **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan penghasilan negara yang berasal dari rakyat dan merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada Negara (Mardiasmo 2011: 1). Penghasilan tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan umum mencakup kepentingan pribadi individu seperti: kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Adanya kepentingan masyarakat tersebut menimbulkan pungutan pajak sehingga pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum. Pemungutan pajak di Indonesia saat ini menggunakan dua sistem, yaitu *self assessment system* dan *withholding system*. *Self assessment system* adalah sistem

pemungutan pajak dimana Wajib Pajak orang pribadi maupun badan diberi wewenang dan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang kepada negara (Hutagaol, 2003). *Withholding system* adalah sistem pemungutan pajak yang perhitungan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak dilakukan oleh pihak ketiga (Krupsky, 2005).

Pentingnya penerapan akuntansi perpajakan atas Pajak Penghasilan yakni pasal 21, pasal 22 dan pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 21 mengenai gaji karyawan, Pajak Penghasilan pasal 22 atas pembelian barang oleh Bendaharawan Pemerintah, BUMN dan BUMD. Pajak Penghasilan Pasal 23 menyangkut pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri.

Pemeriksaan terhadap wajib pajak juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak. Sistem perpajakan yang dianut adalah *Self Assessment* dimana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Dengan demikian Pemeriksaan terhadap wajib pajak dibutuhkan untuk menguji kepatuhan wajib pajak, apakah pajak yang dihitung dan disetor oleh wajib pajak telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: "Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pajak penghasilan Pada PT. Enseval Putera Megatrading Tbk".

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Perpajakan**

Menurut Waluyo (2010:2), mengemukakan pengertian pajak sebagai berikut:

"Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan."

### **Pajak Penghasilan Pasal 21**

Muljono (2010:221) mengemukakan bahwa: "Pajak penghasilan

pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan dan jasa, dan kegiatan sejenis lainnya“.

### **Pajak Penghasilan Pasal 22**

Menurut hukum Indonesia, Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.

### **Pajak Penghasilan Pasal 23**

Menurut Madiasmo (2012:235), ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

## **METODE PENELITIAN**

Rancangan penelitian akan berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian, dimana rancangan penelitian ini dengan menggunakan kualitatif deskriptif yakni mendeskripsikan mengenai penerapan perpajakan pada PT. Enseval Putera Megatrading Tbk.

Sumber data yang akan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu: data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari PT. Enseval Putera Megatrading Tbk dengan jalan mengadakan wawancara secara langsung dengan kepala bagian terkait, dan tenaga kerja yang menangani langsung masalah perpajakan.

Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan interview. Untuk menjawab rumusan masalah, maka metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut: analisis model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Menurut Miles dan Huberman (2008: 16) dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data

dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### ➤ Hasil Penelitian

- Analisis perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan PPh 21 terhadap karyawan

Perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 karyawan tetap dihitung berdasarkan data yang didapatkan di perusahaan PT. Enseval Putera Megatrading Tbk yang terdiri dari data karyawan sebagai berikut :

#### 1. Perhitungan pajak karyawan dengan NPWP

Perhitungan pajak untuk karyawan yang telah memiliki NPWP secara keseluruhan telah sesuai dengan peraturan perpajakan. Perhitungan yang mewakili perhitungan pajak keseluruhan karyawan yang memiliki NPWP dan telah melakukan perhitungan pajak yang benar yaitu:

- a. Bapak Anwar karyawan perusahaan PT. Enseval Putera Megatrading Tbk yang bersatus K/0, telah memiliki NPWP dengan memperoleh gaji Rp. 1.600.000, beserta tunjangan Rp. 2.650.800 besarnya pajak yang dikenakan adalah:

Penghasilan bruto setahun	Rp. 31.809.600
Dikurangi:	
Iuran pensiun	Rp. 600.000
Jumlah netto setahun	Rp. 31.209.600
PTKP (K/0)	Rp. 58.500.000
PKP Setahun	Rp. -
PPh pasal 21 terhutang:	

- b. Ibu Ria karyawan PT. Enseval Putera Megatrading Tbk yang bersetatus TK/0 dengan gaji Rp. 3.150.000, tunjangan Rp. 1.840.187 besarnya pajak yang dikenakan adalah:

Penghasilan bruto setahun	Rp. 59.882.244
Dikurangi:	
Biaya jabatan ( 5% x Rp. 59.882.244 )	Rp. 2.994.112

Iuran pensiun	Rp. 1.769.894
Jumlah netto setahun	<u>Rp. 55.118.238</u>
PTKP (TK/0)	Rp 54.000.000
PKP setahun	Rp. 1.118.238
PPH pasal 21 terutang: 5% x Rp. 1.118.238	Rp. 55.912

Perhitungan yang dilakukan penulis berdasarkan data yang sama dan dihitung sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku adalah sebagai berikut:

Perhitungan milik Anwar

Penghasilan bruto setahun	Rp. 31.809.600
Dikurangi:	
Iuran pensiun	<u>Rp. 600.000</u>
Jumlah netto setahun	Rp. 31.209.600
PTKP (K/0)	Rp. 58.500.000
PKP Setahun	Rp. -
PPH pasal 21 terhutang:	

Perhitungan milik Ria

Penghasilan bruto setahun	Rp. 59.882.244
Dikurangi:	
Biaya jabatan (5% x Rp. 59.882.244 )	Rp. 2.994.112
Iuran pensiun	<u>Rp. 1.769.894</u>
Jumlah netto setahun	Rp. 55.118.238
PTKP (TK/0)	Rp 54.000.000
PKP setahun	Rp. 1.118.238
PPH pasal 21 terutang: 5% x Rp. 1.118.238	Rp. 55.912

Hasil perhitungan diatas tidak menunjukkan perbedaan jumlah PPh pasal 21 terutang menurut perhitungan perusahaan PT. Enseval Putera Megatrading Tbk dan perhitungan penulis berdasarkan ketentuan Undang-undang.

2. Analisis Perhitungan dan Pematangan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Enseval Putera Megatrading Tbk.

PT. Enseval Putera Megatrading Tbk sebagai perusahaan yang memberikan pekerjaan, wajib untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang karyawan tetap ataupun tidak tetap. yang mendapatkan penghasilan teratur mau pun tidak teratur, sesuai dengan sistem yang dipakai perusahaan yaitu *self assessment tax system*. Dengan memakai sistem tersebut, PT. Enseval Putera Megatrading Tbk wajib memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 atas karyawan.

Untuk penghitungan, pemotong, penyetor dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dilaksanakan Bagian Akuntansi Perusahaan selain itu Bagian Akuntansi Perusahaan dibantu oleh Bagian Personalia (MSDM) yang menentukan berapa gaji karyawan yang akan diberikan. Setiap bulan, Bagian Personalia (MSDM) yang akan memberikan slip gaji karyawan ke Bagian Akuntansi Perusahaan, kemudian Bagian Akuntansi Perusahaan menghitung PPh Pasal 21 terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memasukkan penghasilan dan pengurangan didalam perhitungan PPh Pasal 21 dan bagian umum yang akan menyetor dan melaporkan pajak terutang.

Proses menghitung pemotongan PPh Pasal 21 karyawan PT. Enseval Putera Megatrading Tbk sudah benar dan pajak yang disetorkan sesuai dengan perhitungan perpajakan.

Proses pelaporan PT. Enseval Putera Megatrading Tbk terkadang ada selisih dalam menghitung dan memotong Pajak Penghasilan Pasal 21, tapi tidak terlalu banyak, sehingga pihak perusahaan pun langsung menyelesaikan selisih tersebut.

Jadi PT. Enseval Putera Megatrading Tbk tidak pernah menunggak pajak dengan jangka waktu yang begitu lama atau menunggak pajak dalam jumlah pajak yang besar. Karena jika terdapat permasalahan atau selisih dalam pembayaran pihak perusahaan langsung memprosesnya dan membayarkan jika terdapat kurang bayar.

Data dan hasil yang diperoleh, di ambil kesimpulan penyebab terjadi hal ini, adalah perusahaan yang punya sistem keuangan sendiri yang sudah di terapkan dan menggabungkan dengan peraturan perpajakan. Jadi dalam melaksanakan pun juga harus menyeimbangkan atau menelaraskan peraturan atau sistem keuangan perusahaan yang sudah ditetapkan dengan peraturan Undang-Undang(UU) perpajakan.

Prosedur dalam melakukan pemotongan atas gaji karyawan Melakukan pemotongan dan penetapan gaji bersih yang akan diterima karyawan PT. Enseval Putera Megatrading Tbk .

Bagian Accounting PT. Enseval Putera Megatrading Tbk akan memberi laporan kepada bagian Personalia (MSDM), bahwa ada karyawan yang masih menanggung angsuran atau cicilan atas pinjaman yang sudah di ambil karyawan. Lalu bagian Personalia (MSDM) melakukan pengolahan data atas laporan tersebut dan memasukan dalam perhitungan gaji yang nantinya akan diterima oleh karyawan, dan menuliskan ke dalam slip gaji, untuk memberi penjelasan kepada karyawan atas potongan gaji tersebut atau gaji yang diterima oleh karyawan. Setelah bagian personalia (MSDM) selesai dalam menentukan gaji yang akan diterima oleh karyawan tersebut, bagian personalia akan menyerahkan data tersebut kepada bagian Akuntansi untuk dilakukannya perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan yang akan dikenakan kepada karyawan tersebut.

- Analisis perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan barang

PT Enseval Putera Megatrading Tbk merupakan perusahaan dibidang kesehatan yang melakukan penjualan alat-alat kesehatan dan obat-obatan ke rumah sakit dan apotek. Kerja sama yang dilakukan PT Enseval Putera Megatrading Tbk dengan rumah sakit pemerintah dan akan diwajibkan dipungut pajak PPh pasal 22 karena melakukan kerja sama dengan pemerintah. Rumah sakit daerah dibawah kota kabupaten maupun provinsi menggunakan dana belanja daerah untuk membiayai beberapa

kegiatan pengadaan barang, memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak atas penggunaan dana tersebut ke Negara. Dalam realisasinya, pengadaan barang tersebut baik untuk barang kebutuhan pelayanan dengan menggunakan dana dari APBN sangatlah besar.

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan barang oleh PT Enseval Putera Megatrading Tbk

Berikut ini adalah contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan barang oleh PT Enseval Putera Megatrading Tbk bahwa penjualan barang oleh pemerintah dikenai tarif 1,5% x harga pembelian (tidak termasuk PPN). Harga penjualan itu sendiri memiliki pengertian yaitu harga yang ditetapkan berdasarkan jumlah uang yang diberikan pada saat membeli suatu barang.

Contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan barang.

Pada tanggal 13 Mei 2017 PT Enseval Putera Megatrading Tbk melakukan penjualan berupa alat kesehatan dengan total sebesar 207,865,997 kepada RSUP. XXX. Pembayaran dilakukan secara kredit dengan waktu jatuh tempo selama 60 hari. Pada tanggal 12 Juli 2017 RSUP. XXX melakukan pembayaran sebesar 207,865,997 dengan dilampirkan bukti pembayaran pph pasal 22. Berdasarkan transaksi tersebut dikenakan pph pasal 22 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{PPh Pasal 22} = \text{Harga jual} \times 1,5\%$$

$$207,865,997 \times 1,5\% = 3,117,990$$

Atas perhitungan pph pasal 22 tersebut pihak RSUP XXX telah menunaikan kewajiban pajak tersebut dengan menunjukkan bukti setor sebesar 3,117,990.

2. Alur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Penjualan PT Enseval Putera Megatrading Tbk

Tata cara Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan adalah sebagai berikut :

- a. Perusahaan melakukan penjualan berupa obat – obatan ataupun alat kesehatan ke rumah sakit yang kemudian dikenakan PPH pasal 22.
  - b. Perusahaan diberikan bukti setor pembayaran PPh ps 22 oleh rumah sakit.
  - c. Pembayaran PPh pasal 22 dilakukan oleh rumah sakit yang membeli barang dari PT Enseval Putera Megatrading Tbk. PT Enseval Putra Megatrading Tbk diberikan bukti pembayaran pph pasal 22 sebagai bukti pembayaran.
  - d. Pelaporan PPh 22 oleh PT Enseval Putera Megatrading Tbk cabang Surakarta dilakukan oleh pusat dengan melampirkan no rincian faktur yang sudah dibayarkan oleh pihak rumah sakit atau debitur (rekanan/ pembeli).
- Pelaksanaan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 PT Enseval Putera Megatrading Tbk.

Pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 yang dipotong oleh PT Enseval Putera Megatrading Tbk yang paling besar yaitu terhadap Outsourcing, dan jasa perbaikan.

Berdasarkan sistem pemungutan pajak yang berlaku yaitu *Self Assesment System*, PT Enseval Putera Megatrading Tbk bersifat aktif yaitu mendapatkan kewenangan untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, dimana PT Enseval Putera Megatrading Tbk terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. PT Enseval Putra Megatrading Tbk terdaftar sebagai Wajib Pajak serta dikukuhkan dengan Pengusaha Kena Pajak .

1. Pelaksanaan Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Perbaikan PT Enseval Putra Megatrading Tbk

Adapun cara perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu dengan mengalikan tarif sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dengan penghasilan bruto atas Jasa sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Contoh Kasus :

Pada tanggal 18 Januari 2017 PT Enseval Putera Megatrading Tbk melakukan kerja sama dengan rekanan dalam perbaikan AC rutin. Nilai jasa perbaikan AC pada bulan Januari 2017 sebesar Rp 180,000. Dibayar secara tunai sebesar Rp 176,400. Pembayaran kurang dari Rp 180,000 karena dipotong dengan pembayaran PPh Pasal 23 sebesar Rp. 3,600.

Perhitungan PPh Pasal 23 diatas merupakan perhitungan menurut PT Enseval Putra Megatrading Tbk yang dibayarkan. Berikut merupakan perhitungan yang dilakukan peneliti:

PPh Pasal 23 = Jumlah pembayaran jasa perbaikan AC X

2%

$$180,000 \times 2\% = 3,600$$

Dapat disimpulkan bahwa PT Enseval Putera Megatrading sudah melakukan perhitungan, pemotongan, pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 23 sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Di bawah ini adalah pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang dilakukan oleh PT Enseval Putera Megatrading Tbk :

- a. Pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dilakukan oleh bagian keuangan atau akuntansi (*accounting*) sehubungan dengan Jasa dilakukan pada saat akhir bulan masa kontrak atau pada saat PT Enseval Putera Megatrading Tbk melakukan pembayaran terhadap pihak rekanan. Dalam hal ini PT Enseval Putera Megatrading Tbk menerima faktur pajak dari pihak rekanan.
- b. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 diberlakukannya tarif terbaru sesuai dengan perubahan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak berupa penghasilan bruto sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

c. Dokumen atau administrasi yang disiapkan oleh PT Enseval Putera Megatrading Tbk pada saat pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 23 yaitu lembaran Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang didalamnya terdapat besar pajak yang terutang yang kemudian bukti potong tersebut diserahkan kepada pihak rekanan. Berikut ini daftar lampiran bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23:

- Lampiran ke-1 untuk : Wajib Pajak
- Lampiran ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
- Lampiran ke-3 untuk : Pemotong Pajak

d. Kemudian PT Enseval Putera Megatrading Tbk menyimpan bukti pemotongan ini sebagai arsip dan untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa.

Langkah terakhir yang dilakukan oleh bagian akuntansi PT Enseval Putera Megatrading Tbk yaitu membuat Daftar Pemotongan PPh Pasal 23 sebagai bukti dan arsip PT Enseval Putra Megatrading Tbk .

2. Pelaksanaan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa pada PT Enseval Putera Megatrading Tbk

PT Enseval Putera Megatrading Tbk melakukan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 ini melalui Bank Persepsi yang ditunjuk. Penyetoran dilakukan setiap tanggal 10 bulan berikutnya setelah pemotongan dengan dokumen sebagai alat administrasi yang diperlukan yaitu ID Billing dan Bukti Pemotongan Pajak yang terdiri dari:

- Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak
- Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- Lembar ke-3 untuk Pemotong pajak

Dokumen tersebut disimpan sebagai bukti untuk melakukan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Apabila batas penyetoran bertepatan dengan hari libur kerja, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

3. Pelaksanaan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa pada PT Enseval Putera Megatrading Tbk

Setelah kewajiban peyetoran atau pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang terutang atas Jasa selesai

dilakukan, selanjutnya kewajiban PT Enseval Putera Megatrading Tbk adalah melakukan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

Dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yaitu Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 23.

Batas penyerahan atau pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PT Enseval Putera Megatrading Tbk ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Dalam pelaksanaan pelaporan SPT Masa, PT Enseval Putera Megatrading Tbk sudah menggunakan aplikasi e-SPT yang dapat mempermudah pekerjaan mereka.

- **Pembahasan**

Berdasarkan penelitian penerapan pajak penghasilan PT Enseval Putera Megatrading dilakukan secara langsung. Jumlah potongan pajak penghasilan karyawan sebesar 5%. Pemotongan pajak penghasilan tersebut mengacu pada Undang-Undang no. 36 tahun 2008.

Pajak Penghasilan pasal 22 di PT Enseval Putera Megatrading Tbk dipotong, disetorkan dan dilaporkan sesuai dengan UU Perpajakan No. 36 tahun 2008 tentang pajak.

Pajak penghasilan pasal 23 menunjukkan kesesuaian antara perhitungan PT Enseval Putera Megatrading Tbk dengan Undang-Undang no. 36 tahun 2008. PT Enseval Putera Megatrading Tbk melakukan perhitungan, pemotongan, pembayaran dan pelaporan serta setelah semua dilakukan memberikan bukti penyeteroran kepada rekanan PT Enseval Putera Megatrading Tbk.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis data pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

Analisis perhitungan, pemotongan, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 21 pada PT Enseval Putera Megatrading Tbk sudah sesuai dengan undang-undang dan tidak ada selisih perhitungan antara perusahaan dengan peneliti.

Analisis perhitungan, pemotongan, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 22 pada PT Enseval Putera Megatrading Tbk sudah sesuai dengan undang-undang.

Analisis perhitungan, pemotongan, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT Enseval Putera Megatrading Tbk sudah sesuai dengan undang-undang dan tidak ada selisih perhitungan antara perusahaan dan peneliti.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hutagaol, John. 2003. Sekilas Tentang Prinsip dan Konsep Dalam Pelaporan SPT. *Jurnal Perpajakan Indonesia Vol. 2, No. 8 Maret 2003. Pp: 24:28.*
- Kesek, M dan Karamoy, H. 2013. Prosedur Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Pada Pemerintah Kota Bitung. *Accountability, Vol. 2 No2*
- Krupsky, Kenneth J. 2005. Withholding Tax on Interest Paid to US and UK."Financial Institution". *Tax Management International Journal.Pp: 340-342.*
- Mardiasmo. 2012. *Perpajakan*. Andi: Yogyakarta.
- Siska, Febriyanti. 2013. Evaluasi Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Pada CV. Anugrah Multi Sarana. *Jurnal Jurusan Akuntansi STIE MDP.*
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mengenai Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: PT. Cipta Bina Parama. 2008.
- Yuni, Yolanda Amha. 2013. Perhitungan dan Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang. *JURNAL ILMIAH SINERGI POLMED.*